

PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN, PELAPORAN, DAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Pandu Haryanto, S.Kom, M.M¹, Ratih Tri Andayan, S.Ak²
^{1,2} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Y.A.I Jakarta Pusat

ABSTRAK - Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Sistem Pelaporan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada satuan kerja di Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah PNS di seluruh unit kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Metode pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Kriteria tertentu yang menjadi sampel adalah PNS dengan jabatan fungsional perencana dan anggota tim monitoring dan evaluasi tahun 2023 sejumlah 115 orang sebagai responden. Teknik pengumpulan data dengan metode survei menggunakan instrumen berupa kuesioner.

Analisis data penelitian ini menggunakan SmartPLS versi 4 dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern, Sistem Pelaporan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Kerja di Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Implikasi dari penelitian ini yaitu dengan diterapkannya sistem pengendalian intern dan sistem pelaporan yang baik, serta pemanfaatan teknologi informasi secara optimal yang didukung oleh fasilitas internet yang memadai dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kata Kunci: *Akuntabilitas Kinerja, Sistem Pengendalian Intern, Sistem Pelaporan, Pemanfaatan Teknologi Informasi.*

I. PENDAHULUAN

Akuntabilitas kinerja mengacu pada fakta bahwa sektor pemerintahan bertanggung jawab atas segala aktivitasnya yang telah dilaksanakan beserta penggunaan anggarannya demi mencapai visi dan misi organisasi. Kementerian PAN-RB terus berupaya mendongkrak akuntabilitas kinerja melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di seluruh sektor pemerintahan. Evaluasi SAKIP dilakukan untuk mengetahui seberapa baik pelaksanaannya dan untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran. Dampak positif dari penerapan SAKIP adalah terciptanya organisasi yang berkinerja tinggi dan tercapainya efisiensi anggaran yang digunakan.

Evaluasi AKIP BPOM tahun 2022 dilakukan terhadap 58 satuan kerja BPOM di seluruh Indonesia yang terdiri dari 6 Satuan Kerja Eselon I, 4 Satuan Kerja Mandiri Pusat, 34 UPT Balai Besar/Balai POM, dan 14 UPT Loka POM. Nilai AKIP BPOM dihitung berdasarkan rata-rata nilai AKIP di 58 satuan kerja yaitu sebesar 78,07 dengan predikat BB (Sangat Baik).

Tabel 1. Predikat AKIP Satuan Kerja BPOM Tahun 2021 dan 2022

Satuan Kerja di BPOM	Kategori / Predikat													
	AA		A		BB		B		CC		C		D	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Eselon I	-	-	2	2	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon II Mandiri	-	-	1	3	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Balai Besar/ Loka POM	-	-	7	13	26	21	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	0	0	10	18	32	39	0	1	0	0	0	0	0	0

Catatan: Tahun 2021 belum dilakukan penilaian SAKIP di 1 satuan kerja Balai POM (Balai POM Tarakan dan seluruh Loka POM)

Sumber: BPOM, Laporan Evaluasi SAKIP Tahun 2022

Berdasarkan tabel 1. diatas, pada tahun 2022 sebanyak 18 satuan kerja mendapat predikat A (memuaskan). Jika dibandingkan dengan tahun 2021, pada tahun 2022 mengalami adanya peningkatan sejumlah 8 satuan kerja yang memperoleh predikat A (memuaskan). Hal ini menunjukkan bahwa BPOM melakukan perbaikan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerjanya. Namun demikian untuk mendapatkan predikat AA (sangat memuaskan) secara menyeluruh, masih perlu dilakukannya upaya-upaya perbaikan secara berkelanjutan pada seluruh satuan kerja BPOM di seluruh Indonesia.

Dari hasil evaluasi SAKIP tahun 2022, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan adanya kenaikan maupun penurunan nilai AKIP satuan kerja di BPOM, diantaranya: Pertama, Komponen capaian kinerja mempunyai bobot 20% dari total komponen dan berpengaruh pada penilaian komponen yang lain, sehingga capaian kinerja tahun berjalan, kenaikan dan penurunan nilai capaian kinerja dari tahun sebelumnya akan berpengaruh besar pada nilai total hasil evaluasi SAKIP;

Kedua, dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja, BPOM telah memiliki sistem pelaporan, pedoman/panduan dalam rangkapengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja internal yakni aplikasi SIMETRIS, SIMAKIN, dan pedoman penyelenggaraan SAKIP di lingkungan BPOM. Namun terdapat hal yang menyebabkan hasil penilaian AKIP tidak optimal yaitu belum seluruh Satuan Kerja mengimplementasikan sistem pelaporan

maupun pedoman/panduan dengan memadai dan konsisten, pengisian data oleh Satuan Kerja pada aplikasi yang dibangun di BPOM tidak dilakukan dengan lengkap, tidak berkala, dan isian data tidak selaras antar laporan.

Keberhasilan maupun kegagalan realisasi anggaran dan kinerja terpaut pada pelaksanaan sistem pengendalian intern suatu organisasi. Sistem pengendalian intern adalah seperangkat tindakan dan kegiatan yang terintegrasi secara berkelanjutan yang dijalankan oleh manajemen dan semua pegawai untuk memastikan ketercapaian misi organisasi melalui pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan atas aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP No. 60 Tahun 2008). Sistem pengendalian intern yang baik dapat diwujudkan salah satunya dalam keberhasilan pencapaian kinerja organisasi melalui pengukuran kinerja, sehingga tindakan monitoring dan evaluasi kinerja secara rutin diperlukan untuk memberikan keyakinan apakah pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai dengan perencanaan. Asmawanti et al., (2020) dan Safira et al., (2022) pada penelitiannya mengatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Data yang tertera pada laporan keuangan maupun kinerja bersumber dari data dan informasi kegiatan yang dilaksanakan setiap bulan yang dilaporkan kepada



pimpinan. Pada sektor pemerintahan, Sistem pelaporan merupakan rangkaian bentuk pertanggungjawaban guna menyajikan informasi atas pelaksanaan program/kegiatan beserta anggarannya kepada pihak internal maupun eksternal yang disajikan secara jujur, memuat informasi yang objektif, transparan, relevan, tepat waktu dan konsisten, serta berkontribusi terhadap peningkatan AKIP (Ningsih et al., 2022); dan (Novrianti et al., 2022). Novrianti et al., (2022) pada penelitiannya mengatakan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, namun Mulya dan Fauzihardani, (2022) mengatakan hal sebaliknya bahwa sistem pelaporan tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Di era digital saat ini sistem pelaporan tidak terlepas dari peran teknologi informasi. Perkembangan kemajuan teknologi informasi tanpa disadari memaksa orang-orang untuk bisa menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi sehingga setiap orang harus sigap dan berupaya meningkatkan kemampuannya agar tidak tertinggal oleh perkembangan zaman. Menurut Wiguna dalam (Septiyani et al., 2020), pemanfaatan teknologi informasi berhubungan dengan sifat dan tindakan seseorang pada saat menggunakan teknologi informasi untuk penyelesaian pekerjaan dan meningkatkan kinerja. Harianto et al., (2021) pada penelitiannya mengatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, namun Mujannah et al., (2022) dan Mubaraq, (2017) mengatakan hal sebaliknya bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dalam penelitian ini, rumusan masalah dalam adalah:

1. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Kerja di BPOM?;

2. Apakah sistem pelaporan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Kerja di BPOM?;

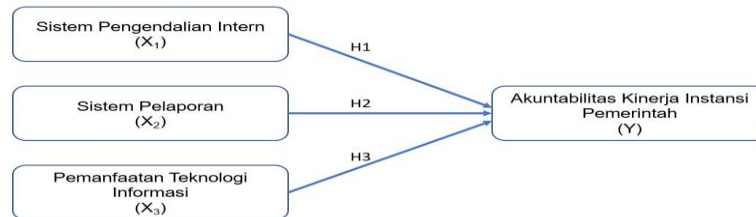
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Kerja di BPOM?

Berdasarkan uraian perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris dan menganalisis apakah sistem pengendalian intern, sistem pelaporan, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Kerja di BPOM. Terlaksananya penelitian ini diharapkan secara khusus dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi seluruh unit kerja BPOM bahwa sistem pengendalian intern dan sistem pelaporan yang baik, serta pemanfaatan teknologi informasi yang optimal memiliki kontribusi dalam mengoptimalkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; secara umum dapat memberikan wawasan dan dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

II. METODA

Akuntabilitas kinerja wajib dilaksanakan oleh seluruh sektor pemerintah sebagai wujud tanggung jawab atas berhasil atau tidaknya pelaksanaan program/kegiatan yang diamanatkan dalam rangka pencapaian misi organisasi yang diukur dengan sasaran atau target kinerja yang ditetapkan sebelumnya melalui penyusunan laporan kinerja secara berkala (PERPRES No. 29 Tahun 2014). Pelaksanaan evaluasi terhadap implementasi SAKIP dilakukan setiap tahun dengan menilai komponen - komponen implementasi SAKIP yang meliputi: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja (Keputusan Kepala BPOM No. 128 Tahun 2022).



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern merupakan seperangkat tindakan dan kegiatan yang terintegrasi secara berkelanjutan yang dilakukan oleh manajemen dan semua pegawai untuk memastikan ketercapaian misi organisasi melalui pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan atas aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP No.60 Tahun 2008).

Sistem Pelaporan

Pada sektor pemerintahan, Sistem pelaporan merupakan rangkaian bentuk pertanggungjawaban guna menyajikan informasi atas pelaksanaan program/kegiatan beserta anggarannya kepada pihak internal maupun eksternal yang disajikan secara jujur, memuat informasi yang objektif, transparan, relevan, tepat waktu dan konsisten, serta berkontribusi terhadap peningkatan AKIP (Ningsih et al., 2022); dan (Novrianti et al., 2022)

Penyusunan Laporan Kinerja berdasarkan siklus anggaran yang berjalan dalam periode 1 tahun. Data dan informasi yang tertuang dalam Laporan Kinerja bersumber dari hasil pengumpulan data kinerja dan pengukuran kinerja secara berkala pada saat pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dengan mekanisme yang diatur pada Keputusan Kepala BPOM Nomor 128 Tahun 2022.

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi sangat berguna dalam banyak hal, salah satunya dalam sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen dapat berjalan dan dioperasikan dengan baik sebagaimana mestinya karena adanya teknologi informasi. Sejalan dengan pendapat Mubaraq (2017) bahwa organisasi telah merespon perkembangan teknologi informasi dengan merancang sistem informasi aplikasi dan website. Dengan

sistem informasi yang didukung teknologi ini, organisasi mengalami transformasi

manajemen dari manajemen tradisional menjadi manajemen modern dan akan menjadi nilai tambah bagi organisasi. Sistem pada manajemen modern ini identik dengan era digital saat ini di mana intensitas penggunaan/pemanfaatan teknologi informasi telah diterapkan pada setiap aktivitas secara menyeluruh dalam rangka meningkatkan kinerja individu maupun organisasi. Menurut Wiguna dalam (Septiyani et al., 2020), pemanfaatan teknologi informasi berhubungan dengan sifat dan tindakan seseorang pada saat menggunakan teknologi informasi untuk penyelesaian pekerjaan dan meningkatkan kinerja.

Penelitian menggunakan analisis kuantitatif. Instrumen penelitian berupa kuesioner digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini. Untuk mengukur pendapat responden pada setiap pernyataan kuesioner digunakan skala likert lima angka. Pengolahan data menggunakan software SmartPLS4 untuk menguji hubungan antara variabel independen (X) dan dependen (Y)

Hipotesa Penelitian

H1 : Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

H2 : Sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

H3 : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Definisi Operasional Variabel

1. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

Penilaian AKIP dilakukan dengan melaksanakan evaluasi terhadap implementasi SAKIP. Dalam hal ini

dilakukan evaluasi terhadap perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja yang menjadi indikator pada variabel ini.

2. Sistem Pengendalian Intern (X1)

Sistem pengendalian intern adalah seperangkat tindakan dan kegiatan yang terintegrasi secara berkelanjutan yang dilakukan oleh manajemen dan semua pegawai untuk memastikan ketercapaian misi organisasi melalui pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan atas aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP No. 60 Tahun 2008). Pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien, serta 4 hal lainnya di atas menjadi indikator pada variabel ini.

3. Sistem Pelaporan (X2)

Pada sektor pemerintahan, Sistem pelaporan merupakan rangkaian bentuk pertanggungjawaban guna menyajikan informasi atas pelaksanaan program/kegiatan beserta anggarannya kepada pihak internal maupun eksternal yang disajikan secara jujur, memuat informasi yang objektif, transparan, relevan, tepat waktu dan konsisten, serta berkontribusi terhadap peningkatan AKIP (Ningsih et al., 2022); dan (Novrianti et al., 2022). Pengumpulan data kinerja mudah dilakukan, verifikasi data kinerja cepat, pengukuran kinerja sesuai manual indikator, pelaporan data kinerja sesuai pedoman, laporan kinerja disajikan dengan jujur, objektif, transparan, dan relevan, laporan kinerja diselesaikan dan dikirim tepat waktu, dan laporan kinerja dipublikasi menjadi indikator pada variabel ini.

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3)

Menurut Wiguna dalam (Septiyani et al., 2020), pemanfaatan teknologi informasi berhubungan dengan sifat dan tindakan seseorang pada saat menggunakan teknologi informasi untuk penyelesaian pekerjaan dan meningkatkan kinerja. Indikator yang digunakan pada variabel ini antara lain: intensitas pemakaian teknologi informasi, penggunaan teknologi informasi meningkatkan kinerja, pemahaman tata cara penggunaan aplikasi, data diinput secara lengkap, data diinput tepat waktu, data diinput dengan teliti, pimpinan memvalidasi data yang diinput, data yang dihasilkan dijadikan dasar pengambilan keputusan, dan akses internet memadai. Teknik Analisis

1. Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan aktivitas menghimpun data untuk memberikan gambaran data yang telah dikumpulkan dalam kuesioner sebagaimana adanya dengan tujuan agar lebih mudah dipahami tanpa maksud menggeneralisasi sampel terhadap populasi (Sugiono, 2022). Penyajian statistik deskriptif didasari pada perhitungan modus, mean, median, dan standar deviasi.

2. Outer Model

Pada model PLS uji validitas dan reliabilitas dilakukan pada tahap evaluasi outer model. Untuk mengukur apakah suatu pernyataan pada kuesioner valid atau tidak digunakan uji validitas. Uji validitas pada SmartPLS dievaluasi melalui validitas discriminant dan validitas convergent. Uji reliabilitas digunakan untuk membuktikan keakurasian, konsistensi, dan ketepatan indikator menjelaskan konstruk.

Tabel 2. Kriteria Outer Model

Validity and Reliability	Parameter	Rule of Thumb
Convergent Validity	Loading Factor	> 0,7
	Average Variance Extracted	> 0,5
Disciminant Validity	Cross Loading	> 0,7
	Heterotrair-monotrait Ratio	HTMT < 0,90
Reliability	Cronbach's Alpha	> 0,70
	Composite Reliability	> 0,70

(Sumber: Ghozali, 2021)

3. Inner Model

Uji hipotesis pada smart PLS dilakukan pada tahap evaluasi inner model dengan tujuan untuk memprediksi pengaruh antar

variabel konstruk (Ghozali, 2021). Pengujian dilakukan dengan menggunakan parameter di bawah ini.

Tabel 3. Kriteria Inner Model

Parameter	Rule of
R-square	Hasil R^2 0.67 (kuat), 0.33 (moderat), dan 0.19 (lemah)
Q-square predictive relevance	nilai observasi yang baik, $Q^2 < 0$ model tidak memiliki nilai observasi yang baik
Efect Size f^2	f-square 0,02 (kecil), 0,15 (sedang), dan 0,35 (besar)
Uji signifikansi	nilai t-statistik > 1,96 (significance level 5%), dan atau p-value

(Sumber: Ghozali, 2021)

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah PNS di seluruh unit kerja BPOM yakni berjumlah 4977 orang berdasarkan data pada aplikasi SIASN BPOM pada bulan Mei tahun 2023. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Kriteria yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah

Jabatan Fungsional (JF) perencana dan/atau anggota tim monev BPOM tahun 2023 dengan total 115 orang yang terdiri dari 11 orang JF perencana, 59 orang anggota tim monev BPOM, dan 45 orang merangkap sebagai JF perencana dan anggota tim monev BPOM.

III. HASIL DAN DISKUSI

Hasil

1. Statistik Deskriptif

Dari 115 kuesioner disebar, 113 kuesioner dikirim kembali oleh responden. Terdapat 2 responden yang tidak mengirim jawaban kuesioner yaitu anggota tim Monev dari

BPOM Ambon dan Mamuju, namun dari kedua unit kerja tersebut sudah terwakili oleh masing-masing JF Perencananya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa responden di setiap unit kerja BPOM telah mewakili memberikan pendapat, sikap, dan persepsinya pada kuesioner penelitian ini.

Tabel 4. Statistik Deskriptif

Variabel	Indikator	STS	TS	RR	S	SS	Total	Mean
Sistem Pengendalian Intern	SPI1	0	0	4	51	58	113	4.478
	SPI2	0	3	17	72	21	113	3.982
	SPI3	0	1	1	39	72	113	4.611
	SPI4	0	2	5	58	48	113	4.345
	SPI5	0	1	12	72	28	113	4.124
	SPI6	0	0	6	63	44	113	4.336
	SPI7	0	1	12	53	47	113	4.292
	SPI8	0	0	3	51	59	113	4.496
	SPI9	0	0	4	54	55	113	4.451
Sistem Pelaporan	SP1	0	0	20	61	32	113	4.106
	SP2	0	3	8	69	33	113	4.168
	SP3	0	0	5	51	57	113	4.460
	SP4	0	0	1	53	59	113	4.513
	SP5	0	0	3	50	60	113	4.504
	SP6	0	0	5	39	69	113	4.566
	SP7	0	0	4	45	64	113	4.531

Variabel	Indikator	STS	T	RR	S	SS	Total	Mean	Std
	PTI7	2	2	13	60	36	113	4.115	0.807
	PTI8	0	2	4	67	40	113	4.283	0.616
	PTI9	1	3	11	56	42	113	4.195	0.785
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	AK1	0	1	4	66	42	113	4.319	0.584
	AK2	0	1	12	65	35	113	4.186	0.646
	AK3	0	0	5	60	48	113	4.381	0.569
	AK4	0	0	5	66	42	113	4.327	0.556
	AK5	0	2	11	69	31	113	4.142	0.650
	AK6	0	0	2	52	59	113	4.504	0.534
	AK7	0	1	2	50	60	113	4.496	0.582
	AK8	0	1	6	50	56	113	4.425	0.635
	AK9	0	2	3	57	51	113	4.389	0.630
	AK10	0	0	2	41	70	113	4.602	0.524
AK11	0	0	6	61	46	113	4.354	0.579	
AK12	0	0	3	58	52	113	4.434	0.547	

(Sumber: Data yang diolah tahun 2023)

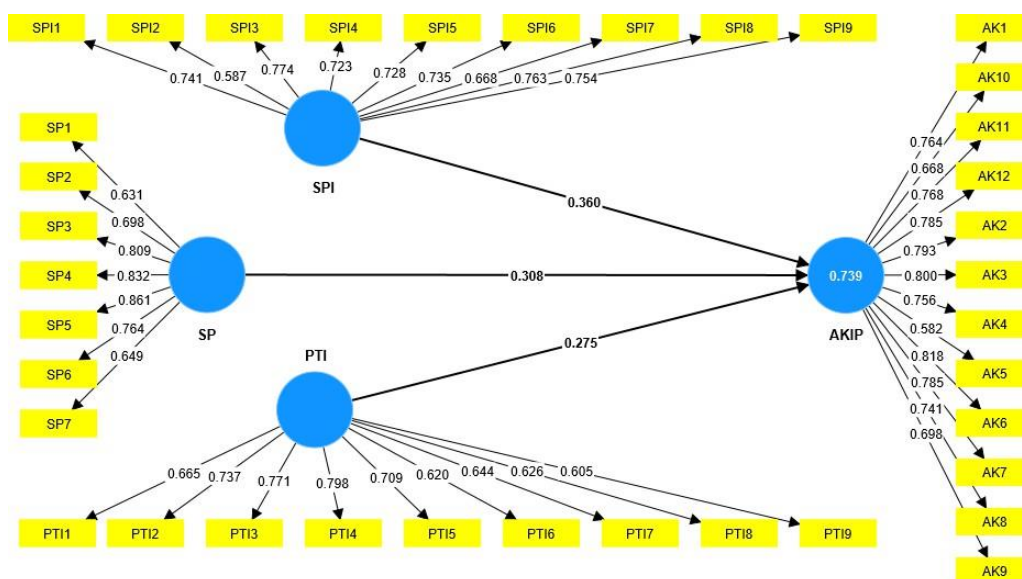
Pada tabel 4, seluruh indikator manifest pembentuk konstruk memiliki nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai mean, yang berarti sebaran data pada setiap indikator mendekati nilai rata-ratanya dan tidak ada kesenjangan yang cukup besar pada jawaban yang diberikan responden.

Pada setiap variabel, indikator dengan nilai mean terendah adalah SPI2 (3.982), SP1 (4.106), PTI 6 (3.885), dan AK5 (4.142). Berdasarkan nilai mean tersebut

menunjukkan bahwa persepsi responden pada pernyataan tersebut secara umum sudah baik namun belum optimal.

2. Outer Model

1. Uji Validitas Convengent a) Loading Factor Rule of thumb parameter loading factor yaitu > 0,7. Apabila pada indikator manifest menunjukkan nilai kurang dari 0,7 maka dilakukan eliminasi terhadap indikator manifest tersebut



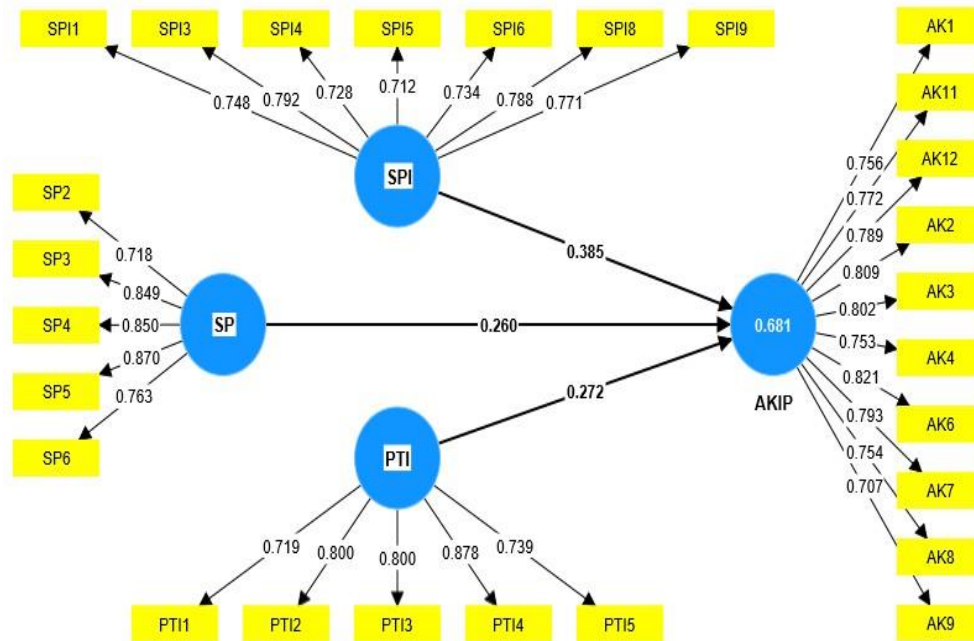
Gambar 2. Loading Factor Awal

Pada gambar 2, dari total 37 indikator terdapat 24 indikator memenuhi syarat

loading factor dengan nilai > 0,7 dan 13 indikator tidak memenuhi syarat karena nilai

loading factornya kurang dari 0,7. 13 indikator tersebut yaitu AK5 (0,582), AK9 (0,689), AK10 (0,668), PTI1 (0,665), PTI6 (0,620), PTI7 (0,644), PTI8 (0,626), PTI9 (0,605), SP1(0,631), SP2 (0,698) , SP7 (0,649), SPI2 (0,587), dan SPI7 (0,668).

Kemudian dari 13 indikator tersebut dilakukan eliminasi pada 10 indikator saja dan 3 indikator lainnya dipertahankan karena nilai loading factornya mendekati 0,7 yaitu pada indikator AK9, PTI1, dan SP2.



Gambar 3. Loading Factor Setelah Eliminasi

Setelah dilakukan eliminasi terlihat adanya perubahan nilai loading factor pada masing-masing indikator terutama pada AK9, PTI1, dan SP2 yang semula lebih kecil dari 0,7

(mendekati 0,7) menjadi > 0,7. Dapat disimpulkan bahwa 27 indikator di atas dinyatakan valid. b) Average Variance Extracted (AVE)

Tabel 5. AVE

Konstruk	AVE
AK	0.603
PTI	0.623
SP	0.660
SPI	0.568

(Sumber: SmartPLS 4, data tahun 2023)

Pada tabel 5, uji validitas convergent dengan parameter AVE pada konstruk AK, PTI, SP, dan SPI diperoleh nilai AVE >

0,5. Dapat ditarik kesimpulan bahwa semua konstruk dalam model ini valid.

2. Uji Validitas Discriminant

a) Cross Loading

	A	PT	SP	SP
AK1	0.756	0.398	0.566	0.690
AK11	0.772	0.543	0.556	0.632
AK12	0.789	0.700	0.618	0.591
AK2	0.809	0.575	0.579	0.550
AK3	0.802	0.581	0.597	0.616
AK4	0.753	0.519	0.594	0.596
AK6	0.821	0.590	0.707	0.597
AK7	0.793	0.584	0.593	0.537
AK8	0.754	0.494	0.576	0.513
AK9	0.707	0.461	0.524	0.529
PTI1	0.455	0.719	0.509	0.430
PTI2	0.606	0.800	0.557	0.452
PTI3	0.500	0.800	0.538	0.467
PTI4	0.575	0.878	0.618	0.489
PTI5	0.613	0.739	0.711	0.579
SP2	0.561	0.587	0.718	0.581
SP3	0.691	0.629	0.849	0.676
SP4	0.640	0.676	0.850	0.629
SP5	0.653	0.589	0.870	0.725
SP6	0.539	0.568	0.763	0.519
SPI1	0.583	0.536	0.612	0.748
SPI3	0.540	0.427	0.613	0.792
SPI4	0.510	0.352	0.485	0.728
SPI5	0.532	0.447	0.544	0.712
SPI6	0.578	0.446	0.586	0.734
SPI8	0.630	0.504	0.676	0.788
SPI9	0.595	0.522	0.559	0.771

(Sumber: SmartPLS 4, data primer tahun 2023)

Pada tabel 6, uji validitas discriminant dengan parameter cross loading diperoleh nilai cross loading > 0,7 pada semua indikator. Selain itu nilai indikator pada konstruk masing-masing memiliki nilai lebih

besar daripada nilai indikator tersebut pada konstruk lainnya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa data pada model ini memiliki validitas discriminant yang baik (valid).

b) Heterotrait-monotrait Ratio (HTMT)

Tabel 7. Heterotrai-monotrait Ratio (HTMT)

	HTM
PTI <-> AKIP	0.783
SP <-> AKIP	0.846
SP <-> PTI	0.869
SPI <-> AKIP	0.836
SPI <-> PTI	0.708
SPI <-> SP	0.883

(Sumber: SmartPLS 4, data tahun 2023)

Pada tabel 7, uji validitas discriminant dengan parameter HTMT diperoleh nilai HTMT masing-masing pasangan konstruk < 0,90. Ini menunjukkan validitas

discriminant pasangan konstruk tercapai (valid).

3. Uji Reliabilitas

Tabel 8. Cronbach's Alpha dan Composite Reliability

Konstruk	Cronbach's	Composite reliability	Composite reliability
AKIP	0.926	0.928	0.938
PT	0.847	0.854	0.891
SP	0.869	0.877	0.906
SP	0.873	0.875	0.902

(Sumber: SmartPLS 4, data tahun 2023)

Pada tabel 8. uji reliabilitas dengan parameter cronbach's alpha dan composite reliability diperoleh nilai $> 0,7$. Dapat

ditarik kesimpulan bahwa semua konstruk memenuhi persyaratan uji reliabilitas (reliabel).

3. Inner Model

Evaluasi Inner model dilakukan setelah evaluasi outer model telah memenuhi syarat

validitas dan reliabilitas pada keseluruhan indikator manifest pembentuk konstruk.

a. R-square

Tabel 9. R-square

	R-square	R-square adjusted
AKIP	0.681	0.673

(Sumber: SmartPLS 4, data primer tahun 2023)

Pada tabel 9. evaluasi inner model dengan parameter R-square menghasilkan nilai R-square sebesar 0,681 yang menunjukkan bahwa model termasuk kategori kuat karena nilai R-square lebih besar dari 0,67. R-square adjusted menjelaskan variasi konstruk

AKIP dapat dijelaskan oleh konstruk SPI, SP, dan PTI sebesar 0,673 (67,3%), sedangkan 32,7% dijelaskan oleh konstruk lain diluar model ini.

b. Q² Predictive Relevance

Tabel 10. Q² Predictive Relevance

	Q ² predict
AKI	0.640

(Sumber: SmartPLS 4, data primer tahun 2023)

Pada tabel 10 nilai Q² Predictive Relevance sebesar 0,640 > 0 menunjukkan bahwa

model ini memiliki nilai observasi (predictive relevance) yang baik.

c. f-square

Tabel 11. f-square

	f-square
PTI -> AKIP	0.101
SP -> AKIP	0.059
SPI -> AKIP	0.184

(Sumber: SmartPLS 4, data primer tahun 2023)

Berdasarkan tabel 11, nilai f-square variabel PTI terhadap AKIP sebesar 0,101 dan SP terhadap AKIP sebesar 0,059 lebih besar dari 0,02 dan lebih kecil dari 0,15 artinya variabel PTI dan SP memiliki pengaruh yang kecil terhadap AKIP. Sedangkan nilai f-square variabel SPI terhadap AKIP sebesar 0,184 lebih besar dari 0,15 dan lebih kecil dari 0,35 artinya variabel SPI memiliki pengaruh sedang terhadap AKIP.

d. Signifikasi T-statistik dan P-Value

Uji t-statistik dan p-value dilakukan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel SPI, SP, dan PTI terhadap AKIP. Suatu hipotesis diterima atau ditolak dapat dilihat dari nilai signifikansi antar konstruk. H_0 diterima dan H_0 ditolak apabila t-statistik > 1.96 dan nilai p-values < 0.05 , begitu pula sebaliknya.

Tabel 12. Path Coefficient

	Original sample	Sample mean	(STDEV)	T statistics	P values
PTI -> AKIP	0.272	0.271	0.101	2.700	0.007
SP -> AKIP	0.260	0.258	0.129	2.025	0.043
SPI -> AKIP	0.385	0.394	0.121	3.188	0.001

(Sumber: SmartPLS 4, data tahun 2023)

Pada tabel 12. diperoleh nilai koefisien parameter pada kolom original sampel, t-statistik dan p-values yang menunjukkan bahwa:

- Variabel SPI memiliki pengaruh positif terhadap AKIP dimana nilai koefisien parameter menunjukkan angka positif sebesar 0,385 artinya jika SPI meningkat satu satuan unit maka AKIP dapat meningkat sebesar 38,5%. Pada uji signifikansi, variabel SP memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel AKIP dimana nilai t-statistik SPI terhadap AKIP $3,188 > 1,96$ dan nilai p-value $0,001 < 0,05$. Berdasarkan nilai t-statistik dan p-value tersebut maka H_1 diterima dan H_0 ditolak.

H_1 : Sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

- Variabel SP memiliki pengaruh positif terhadap AKIP dimana nilai koefisien parameter menunjukkan angka positif sebesar 0,260, artinya jika SP meningkat satu satuan unit maka AKIP dapat meningkat sebesar 26,0%. Pada uji signifikansi, variabel SP memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel AKIP dimana nilai t-statistik SP terhadap AKIP $2,025 > 1,96$ dan nilai p-value $0,043 < 0,05$. Berdasarkan nilai t-statistik dan p-value tersebut maka H_2 diterima dan H_0 ditolak.

H_2 : Sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

- Variabel PTI memiliki pengaruh positif terhadap AKIP dimana nilai koefisien parameter menunjukkan angka positif sebesar 0,272 yang artinya jika PTI meningkat satu satuan unit maka AKIP dapat meningkat sebesar 27,2%. Pada uji signifikansi, variabel PTI memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel AKIP dimana nilai t-statistik PTI terhadap AKIP $2,700 > 1,96$ dan nilai p-value $0,007 < 0,05$. Berdasarkan nilai t-statistik dan p-value tersebut maka H_3 diterima dan H_0 ditolak.

H_3 : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Diskusi/Pembahasan

1. Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Uji hipotesis pada tabel 12, diperoleh nilai t-statistik $3,188 > 1,96$ dan p value $0,001 < 0,05$ untuk variabel Sistem Pengendalian Intern yang membuktikan bahwa variabel Sistem Pengendalian Intern memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada

Satuan Kerja di BPOM. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian (Asmawanti et al., 2020) dan (Safira et al., 2022) yang membuktikan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dari hasil penelitian di atas juga membuktikan bahwa Sistem Pengendalian Intern memiliki andil dalam peningkatan nilai AKIP satuan kerja BPOM. Namun pada uji parameter f-square untuk ukuran pengaruh pada variabel Sistem Pengendalian Intern diperoleh nilai 0,184 yang menjelaskan bahwa ukuran pengaruh variabel Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sedang. Secara umum masih perlu peningkatan penerapan Sistem Pengendalian Intern di setiap unit kerja BPOM dalam meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perencanaan program/kegiatan yang telah disusun dengan baik harus diimbangi dengan pelaksanaan kegiatan yang baik. Breakdown kegiatan yang tertuang dalam planning of action dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan yang terorganisir. Selain itu kegiatan pengendalian berupa monitoring dan evaluasi sangat penting untuk memonitor dan menciptakan solusi atas kendala atau hambatan yang menyebabkan kegiatan tidak berjalan sesuai rencana. Kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja yang efektif akan berdampak besar terhadap hasil atau capaian kinerja di unit kerja yang kemudian akan berkontribusi pada capaian kinerja satuan kerja hingga capaian kinerja organisasi BPOM. Adapun nilai bobot penilaian capaian kinerja pada evaluasi SAKIP yaitu sebesar 20%, cukup besar berkontribusi dalam penilaian AKIP.

2. Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Uji hipotesis pada tabel 12, diperoleh nilai t-statistik $2,025 > 1,96$ dan p value $0,043 < 0,05$ pada variabel Sistem Pengendalian Intern yang menunjukkan bahwa variabel Sistem Pelaporan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Kerja di BPOM. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian Novrianti et al., (2022) namun berbeda dengan penelitian Mulya dan Fauzihardani, (2022) yang menyatakan bahwa sistem pelaporan tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dari hasil penelitian di atas juga menunjukkan bahwa sistem pelaporan turut memberikan kontribusi dalam peningkatan nilai AKIP Satuan Kerja BPOM.

Namun pada uji parameter f-square untuk ukuran pengaruh pada variabel Sistem Pelaporan diperoleh nilai 0,059 menjelaskan bahwa ukuran pengaruh variabel Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah kecil. Secara umum masih sangat perlu peningkatan penerapan Sistem Pelaporan di setiap unit kerja BPOM dalam meningkatkan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam sistem pelaporan, tahap paling awal adalah petugas mengumpulkan data mentah dari pemilik data untuk dilakukan rekapitulasi sebagai bahan data laporan. Jika pengumpulan data tidak mudah, dapat mengakibatkan keterlambatan pelaporan kinerja, atau ketidaklengkapan data yang dilaporkan. Tahap kedua dari sistem pelaporan yaitu pemeriksaan data mentah dari pemilik data yang telah di rekapitulasi kepada atasan (subkoordinator). Beberapa responden menyatakan bahwa proses verifikasi memakan waktu lama yang juga akan berdampak keterlambatan pelaporan kinerja. Kedua permasalahan tersebut harus diberikan penanganan supaya data yang dilaporkan lengkap, dan pelaporan dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Bentuk penanganan dapat dilakukan dengan cara membuat mekanisme pelaporan yang diadopsi dari pedoman monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan, serta membentuk tim data kinerja internal di unit kerja.

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Uji hipotesis pada tabel 12, diperoleh nilai t-statistik $2,700 > 1,96$ dan p-value $0,007 < 0,05$ pada variabel Pemanfaatan

Teknologi Informasi yang membuktikan bahwa variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Kerja di BPOM. Serupa dengan penelitian Harianto et al., (2021) namun berbeda dengan penelitian Mujannah et al., (2022) dan Mubaraq, (2017) yang menyimpulkan bahwa Pemanfaatan teknologi informasi tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dari hasil penelitian di atas membuktikan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi turut memberikan kontribusi peningkatan nilai AKIP satuan kerja BPOM. Namun pada uji parameter f-square untuk ukuran pengaruh pada variabel Sistem Pelaporan diperoleh nilai 0,101 yang menunjukkan bahwa ukuran pengaruh variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah kecil.

Pemanfaatan teknologi informasi masih perlu ditingkatkan yang pertama mulai dari akses internet yang memadai, terutama pada Balai dan Loka BPOM yang lokasinya masih sulit terjangkau internet, dimana di era digital saat ini untuk mempermudah, mempercepat komunikasi, penyampaian informasi, dan pelaporan ke pusat membutuhkan peran teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi yang berkaitan dengan sifat dan sikap seseorang pada saat menggunakan teknologi informasi. Dalam hal ini beberapa responden berpendapat bahwa kesalahan penginputan data realisasi kinerja pada aplikasi SIMETRIS kerap terjadi. Untuk menanggulangnya, setiap unit kerja melakukan mitigasi terhadap adanya risiko ketidaktepatan petugas dalam menginput data tersebut. Hal ini dimungkinkan sebab manajemen waktu dari petugas yang kurang baik, menginput data dengan tergesa-gesa, atau dampak pekerjaan yang menumpuk sehingga kurang fokus dan menginput data yang dilaporkan. Berkaitan dengan sikap pimpinan dalam memvalidasi data realisasi kinerja yang diinput petugas. Seyogyanya data yang diinput petugas akan dilanjutkan proses validasi data untuk memastikan bahwa

data yang diinput valid, reliabel, dan obyektif. Setelah dilakukan validasi oleh pimpinan unit/satuan kerja, maka dilakukan verifikasi data oleh Biro Perencanaan dan Keuangan. Kesalahan penginputan data realisasi kinerja oleh petugas seharusnya dapat segera diperbaiki sebelum masuk ke tahap selanjutnya verifikasi. Disinilah peran pimpinan tidak kalah pentingnya untuk meminimalisir kesalahan data realisasi kinerja yang dilaporkan. Berdasarkan Keputusan Kepala BPOM No. 128 tahun 2022, solusi apabila kesalahan penginputan realisasi kinerja terlanjur tervalidasi dan telah dilakukan verifikasi oleh Biro Perencanaan dan Keuangan maka unit kerja perlu mengirimkan usulan perubahan data realisasi kinerja kepada Biro Perencanaan dan Keuangan.

IV. KESIMPULAN

1. Sistem pengendalian intern (X1) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
2. Sistem pelaporan (X2) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
3. Pemanfaatan teknologi informasi (X3) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Untuk peneliti kedepannya dapat menambah variabel lain, seperti komitmen pimpinan, motivasi kerja, inovasi manajemen kinerja, dan inisiatif pemberantasan korupsi (WBK/WBBM), dan/atau memilih instansi pemerintah lainnya sebagai obyek yang ingin diteliti sehingga dapat memperluas penelitian dan menghasilkan temuan empiris baru kedepannya. Dalam upaya penguatan akuntabilitas kinerja diharapkan agar setiap unit kerja BPOM senantiasa menerapkan sistem pengendalian intern dan sistem pelaporan, serta mengoptimalkan pemanfaatan/penggunaan teknologi informasi dengan baik.

Daftar Pustaka

- Asmawanti, D., Sari, A. M., Fitranita, V., & Wijayanti, I. O. (2020). Dimensi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 5(1), 85–94. <https://media.neliti.com/media/publications/419614-none-3be3a3a9.pdf>
- B POM RI. (2022). Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 128 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan.
- Ghozali, I. (2021). *Partial Least Square Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.2.9* (3rd ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harianto, D., Kennedy, & Zarefar, A. (2021). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP) (Studi Pada Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir). *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 6(1), 122–139. <https://doi.org/10.29303/jaa.v6i1.111>
- Mujannah, M., Safriansyah, S., Firdaus, I., & Fatimah, S. (2022). Dampak Accrual Basic dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah. *Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(3), 3065–3076. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.1006>
- Mulya, H. G., & Fauzihardani, E. (2022). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Kepatuhan Terhadap Regulasi sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 4(1), 192–212. <https://doi.org/10.24036/jea.v4i1.463>
- Ningsih, S. W., Yusuf, M., & Andayani, T. D. (2022). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *The 16th University Research Colloquium* 2022. <http://repository.urecol.org/index.php/proceeding/article/view/2392>
- Novrianti, T., Mahrina, H., & Herawati, H. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 9(1), 1–15. <https://doi.org/10.55963/jraa.v9i1.436>
- Pemerintah RI. (2008). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Pitaloka, J. J., & Handayani, N. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada OPD Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(1). <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/1848>
- Presiden RI. (2014). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. www.hukumonline.com
- Rakhma, S. Y., & Sulistyowati, E. (2021). Determinasi Penganggaran, Sistem Pengendalian Internal, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(8). <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4133>
- Safira, F., Rachma Sari, K., & Aryani, Y. A. (2022). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palembang. *Journal Scientific of Mandalika (JSM)*, 3(7). <http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jomla/issue/archive>
- Septiyani, G., Taufik, T., & Julita, J. (2020). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah: Apakah Dipengaruhi Kompetensi Aparatur, Teknologi Informasi, Pengendalian Akuntansi,

Dan Sistem Pelaporan? *Jurnal
Kajian Akuntansi Dan Bisnis
Terkini*, 1(2), 183–200.
[https://doi.org/10.31258/jc.1.2.184-
201](https://doi.org/10.31258/jc.1.2.184-201)

Sugiono. (2022). *Metode Penelitian
Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (2
Cetakan ke-29). Alfabeta.